DUNIA ISLAM DAN TATA DUNIA BARU
(Suatu Analisis Kritis)

Oleh : Muhammad Azhar

Dewasa ini banyak bermunculan isu-isu kontroversial diantaranya ialah: *New Age, Clash Civilization*, Posmo (Postmodernisme), post strukturalisme, neo-modernisme, dan Tata Dunia Baru (*the New World Order*). Secara umum, istilah atau isu di atas menyiratkan adanya upaya pembongkaran (*deconstruction*), rekonstruksi dan reaktualisasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, kini dan mendatang.

I

Sesuai dengan tema sentral tulisan ini, maka isu Tata Dunia Baru (*the New World Order*) akan lebih banyak disimak dan dikaji, agar dapat ditangkap perspektif maupun prospeknya di masa depan. Sementara itu lainnya hanya sebagai pelengkap belaka.

Isu Tata Dunia Baru ini mendadak menjadi populer setelah dilontarkan oleh mantan presiden AS, George Bush, yang secara ideologis-politis, isu tersebut diangkat untuk 'kepentingan' AS sebagai satu-satunya *superpower* dan sekaligus bertindak sebagai 'polisi' dunia, lebih-lebih setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai rival berat AS selama ini.[1]

Bila ditinjau dari sudut perspektif kepentingan AS (baca: Barat), isu Tata Dunia Baru memang belum menampakkan kejelasannya, sebagaimana tersirat dalam kutipan berikut:

> .... dewasa ini bangsa-bangsa di dunia sedang hidup dalam zaman yang mengalami perubahan dengan cepat dan mendasar. Perubahan-perubahan penting yang berlangsung dalam pola hubungan internasional masih akan terus berlanjut. Tata Dunia yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua telah mulai ditinggalkan, tetapi tata dunia baru masih mencari bentuk yang mantap.[2]

Hal yang senada dengan ungkapan di atas tercermin pula pada paragraf berikut:

---

[1]M. Riza Sihbudi dan Achmad Hadi (ed), *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992) h.5. Lihat juga: Idem, *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington* (Bandung: Mizan, 1992) h.16. Idem, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah* (Bandung: PT ERSECO, 1993) h. 20, 179-183.

[2]Presiden Soeharto, "GNB Perlu Kembangkan Konsepsi, Strategi, dan Pendekatan Baru", *Kompas*, 26 Agustus 1992, h.1

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

.... sehingga tak lagi dapat dikesampingkan begitu saja oleh negara-negara Barat, di mana sampai sekarang mereka sendiri belum berhasil menjelmakan suatu Tatanan Dunia Baru yang mereka ributkan itu.[3]

Ketidakjelasan konsep Tata Dunia Baru yang dilontarkan negara-negara Barat di atas telah menimbulkan kecurigaan di kalangan negara berkembang, sebagaimana tercermin dalam Debat Umum hari kedua KTT X GNB 2 September 1992 di Jakarta, dimana para pembicara mengingatkan: "... jangan sampai Tata Dunia Baru (TDB) yang belum ketahuan bentuknya itu akan dimanfaatkan Barat untuk mendominasi kehidupan politik dan ekonomi dunia".[4] Dalam pada itu, pidato sebagian besar ketua delegasi dalam KTT X GNB tersebut mengakui bahwa: ".... bentuk akhir perubahan fundamental dunia internasional memang belum tercapai. Tetapi mereka mengingatkan, jangan sampai dunia terjebak ke dalam dominasi negara atau blok tertentu."[5]

Selanjutnya, bila dalam perspektif Barat, isu Tata Dunia Baru belum memiliki kejelasan konsepsional, maka bagi negara-negara Timur (negara berkembang) pada hakekatnya telah memiliki acuan yang jelas tentang isu Tata Dunia Baru tersebut. Menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, jauh sebelum George Bush melontarkan isu Tata Dunia Baru, almarhum Bung Karno secara jelas telah lebih awal melontarkan gagasan perlunya tatanan dunia yang lebih baru.[6]

Apa yang dinyatakan oleh Prof. Dr. H.A. Mukti Ali di atas tak lain berkaitan dengan pidato almarhum Bung Karno pada sidang umum PBB bulan September 1960. Judul pidato tersebut "Membangun Dunia Kembali" atau *To Build the World a new*.[7] Dalam pidatonya Bung Karno menerangkan tentang perbedaan antara "negeri-negeri yang sedang tumbuh dan negeri-negeri tua yang sedang mempertahankan kekuasaannya yang sudah mapan".[8] Kepada sidang pendengar di PBB itu ia menjelaskan bahwa:

konflik dunia yang sebenarnya bukanlah *perang dingin* (dengan kemungkinan berdirinya kekuatan ketiga yang netral), tetapi disebabkan oleh imperialisme baju

[3]S. Darusman, "Tatanan Dunia Baru, GNB dan Indonesia", *Kompas*, 16 Juni 1993, h. 4. Lihat juga: Menlu Ali Alatas, "Tata Dunia Baru Masih Jauh", *Bernas*, Yogyakarta, 27 Desember 1993, h.1

[4]Presiden Soeharto, "Tata Dunia Baru Jangan Sampai Didominasi Dunia Barat Lagi", *Kompas*, 3 September 1992, h. 1.

[5]*Ibid*

[6]Wawancara dengan Prof. Dr. H.A. Mukti Ali di Yogyakarta (di kediaman beliau) 26 Agustus 1993

[7]John D. Legge, *Sukarno Sebuah Biografi Politik* (Jakarta, Sinar Harapan, 1985) h. 394 (Judul Asli: *Sukarno, A Political Biography*, Allen Lane The Penguin Press, 1972). Tanpa nama pengarang, *Triwindu Konperensi AA 1955-1979*, Yayasan Idayu (Jakarta: 1981) h. 34. M. Sabir, *Quo Vadis Nonblok* ? (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990) h. 69

[8]John D. Legge, *Op.cit.* Bandingkan dengan: Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, jilid I (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964) h. 1

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

baru pada satu pihak dan nilai-nilai keadilan, persamaan dan kemerdekaan bagi rakyat-rakyat yang sudah sekian lama tertindas di dunia, pada pihak lain. Kepada "negeri-negeri yang sudah mapan" ia kemukakan imperialisme belum mati ... "Banyak di antara Tuan-tuan dalam sidang ini tidak pernah mengenal imperialisme." "Tetapi saudara-saudara saya di Asia dan Afrika telah mengenal cambuk imperialisme. Mereka telah menderitanya, mereka mengenal bahayanya dan kelicikannya serta keuletannya."[9]

Apa yang dikemukakan Bung Karno di forum PBB tersebut tidak lain merupakan akumulasi pemikiran yang berkembang dalam Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dimana menurut mantan Menteri Luar Negeri RI Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, hasil keputusan Konperensi Asia Afrika (KAA) itu dapat dijadikan agenda acuan dalam upaya membentuk Tata Dunia Baru:

> Menanggapi keinginan masyarakat dunia untuk membentuk suatu Tatanan Dunia Baru, (*New International Order*), ... Indonesia cukup memiliki konsep atau pikiran mendasar, pengalaman sejarah dan kemampuan untuk mengambil prakarsa dalam pembentukan Tatanan Dunia Baru itu. Berlainan dengan *New International Order* yang dicanangkan mantan Presiden AS George Bush yang tidak pernah jelas maksudnya, sebaliknya Indonesia memiliki konsep dan program yang jelas. Keputusan-keputusan konperensi Asia-Afrika bisa dijadikan agenda untuk negara-negara berkembang dalam usaha membentuk Tatanan Dunia Baru.[10]

Di sisi lain, isu Tata Dunia Baru telah memicu munculnya fenomena kajian yang prediktif yang erat kaitannya dengan tema Tata Dunia Baru itu sendiri seperti: kajian tentang kapitalisme baru, tata ekonomi dunia baru, tatanan informasi internasional, dan lain-lain sebagainya.[11] Beberapa komponen (bagian) Tata Dunia Baru tersebut misalnya yang menyangkut ideologi-

---

[9]John D. Legge, *Op.cit*, h. 395

[10]Mantan Menlu RI Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, "Politik Luar Negeri RI Kini Tidak Low Profile", *Kompas*, 13 Desember 1993, h. 14

[11]Bandingkan dengan: Josst Kuitenbrouwer, *Tata Baru Kapitalisme Sedunia*, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan, 1983 (judul asli: *The New Capitalist World Order:* Implications for Development in North and *South- East Asia*, The Hague Netherlands, Institute of Social Studies, 1981). Bahtiar Effendy, "Tata Informasi Dunia Baru: Sebuah Upaya untuk Menghilangkan Hegemoni Komunikasi Dunia Maju", dalam; Rusydi Hamka (ed), *Islam dan Era Informasi*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1989. Pudjo Suharso, "ASEAN dalam Tata Internasional Baru", *Kompas*, 7 Agustus 1993, h. 4. Akhbar S. Ahmad, *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, Bandung, Mizan, 1993, h. 114-121. Eduard Depari, "Tatanan Baru Informasi Internasional", *Kompas*, 27 Agustus 1992, h. 4. Mohammed Bedjaoui, "Hukum Perkembangan Internasional dan Perkembangan Hukum Internasional", h. 133 serta "Ciri Global Ekonomi Dunia dan Kesatuan Hukum Internasional", Jakarta, Gunung Agung, 1983, h. 271-294. Imran N. Hosein, "The Islamic Movement and The New World Order", dalam majalah *Al-Nahdah*, Vol.12, No. 3&4 (3rd & 4th Quarter, 1992), p.21-23 dan 47. ST. Gitowiratmo S, Pr, "Tata Dunia Baru dan Tata Surga Baru: Dalam Relasi, Sebuah renungan dalam masa Paskah", majalah *Rohani*, Maret 1993, h. 90-94. Todiruan Dydo, "*Islam Fundamentalis dan Kegusaran Masyarakat Barat*, Jakarta, PT Golden Terayon Press, 1992, h. 83-92. Isma'il Raji al-Faruqi, *Tauhid*, Bandung, Pustaka, 1988, h. 190-199. Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan Ekonomi-Politik Indonesia & Tantangan Dunia* (2), Jakarta, Gramedia, 1993, h. 498-523. Mohammed Bedjaoui, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, Jakarta, PT Gunung Agung, 1985

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

politik (seperti isu demokratisasi), ekonomi (fenomena munculnya blok-blok ekonomi dunia), informasi dan budaya atau peradaban.[12]

Gejala menarik lainnya ialah tentang terma yang digunakan khususnya dalam tata hubungan internasional. Bila dulu terma yang dipakai adalah Timur dan Barat (lebih bersifat ideologis-politis), kini tampaknya mengalami pergeseran menjadi Utara dan Selatan (konotasi ekonomi dan iptek). Berdasarkan hal tersebut, para pengamat menyatakan, bahwa perang di masa yang akan datang sudah beralih dari perang ideologi menjadi perang ekonomi.[13]

II

Berikut ini penulis mencoba lebih merincikan berbagai komponen yang mengiringi isu Tata Dunia Baru sebagaimana telah disebutkan di atas.

Secara ideologis-politis, kini telah terjadi perubahan politik internasional terutama setelah ambruknya Uni Soviet (Komunisme). Dewasa ini hanya ada satu negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat (AS). Namun demikian dijumpai usaha-usaha pihak lain untuk berperan di panggung politik internasional, seperti Eropa Barat, Dunia Islam, Gerakan Nonblok.[14]

Interaksi dari berbagai kekuatan politik di atas cenderung melahirkan perebutan hegemoni. Secara rasional, dalam perebutan hegemoni di atas, bagaimanapun juga negara atau bangsa yang maju selalu memenangkan perebutan itu. Dapat diperkirakan bahwa pemikiran tentang upaya pembentukan Tatanan Dunia yang lebih baru akan terjebak dalam pandangan dan sikap politik yang diwarnai oleh kepentingan negara-negara yang lebih maju.

Untuk menghindari jebakan politik di atas, maka negara-negara berkembang haruslah melakukan *back to basic* dalam pengertian kembali melihat akar tradisi mereka yang telah mengkristal dalam ideologi kebangsaan

---

[12]Istilah komponen (component) berarti: bagian atau pelengkap (lihat: John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 1988, h. 133). Jadi komponen di sini berarti; bagian-bagian atau aspek-aspek yang mengiringi munculnya fenomena tata-dunia baru sebagaimana tertera dalam ulasan tesis ini, yakni: aspek ideologi-politik, ekonomi, informasi, budaya (peradaban)

[13]Widjojo Nitisastro, "Kemajuan Selatan, Bukti GNB Bukan Dinosaurus Politik", *Kompas*, 29 Agustus 1992, h. 1 dan 13; dan dalam sumber yang sama, "Karya Untuk Selatan, Karya Untuk Nonblok". YB Mangunwijaya, "Yang Mana Utara, Yang Mana Selatan?", *Kompas*, 3 September 1992, h. 4

[14]Deliar Noer, "Dampak Perubahan di Kawasan Asia Pasifik Terhadap Perkembangan Agama di Indonesia" (h.1); makalah pada Dialog tentang *Peran Negara-negara Berkembang dalam Menyusun Tata Dunia Baru*, diselenggarakan oleh Jama'ah Shalahuddin di Gelanggang Mahasiswa UGM, 31 Oktober 1992

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

masing-masing, terlepas apakah ideologi tersebut berdasarkan tradisi, agama dan warisan kultural lainnya.[15]

Secara ekonomis, tatanan dunia di masa mendatang lebih diwarnai oleh adanya persaingan bisnis (ekonomi) ketimbang ideologis-politis. Dengan kata lain, bila di masa lalu, kekuatan politik dan militer menjadi panglima maka di masa yang akan datang, ekonomilah yang menjadi panglima.

Tatanan Dunia Baru di masa mendatang, paling tidak, ditandai oleh dua hal :

i. Dalam tingkat global, bergesernya format politik internasional dari yang bertemakan politik keamanan ke arah tema-tema ekonomi.
ii. Dalam tingkat regional, berakhirnya perang dingin telah memungkinkan prospek pencapaian penyelesaian konflik regional.[16]

Namun tak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian dunia dewasa ini lebih dikuasai oleh negara-negara maju yang sebagian besar merupakan negara Barat. Istilah Utara-Selatan mencerminkan hal ini. GNB misalnya secara kelakar disebut "Gerakan Negara Berutang".[17]

Walaupun terlihat adanya ketimpangan antara Utara yang kaya dengan selatan yang miskin, ternyata pihak Utara juga mengalami krisis perekonomian. Krisis tersebut muncul akibat adanya persaingan yang semakin besar dari negara industri baru di Selatan yang ekspornya ke negara-negara industri kapitalis Utara dan negara-negara yang kaya dengan minyak bumi terus-menerus meningkat.[18]

Berdasarkan kenyataan tersebut, sudah saatnya diwujudkan kerjasama ekonomi yang konstruktif antar negara maju maupun negara berkembang. Karena upaya untuk menciptakan tata ekonomi dunia baru haruslah berdasarkan pada keseimbangan antar negara. Praktek-praktek dari sistem perekonomian yang spekulatif dan manipulatif pada gilirannya tidak hanya merugikan negara berkembang tapi juga bagi negara-negara yang sudah maju.

Adapun upaya-upaya konstruktif yang dapat dilakukan di antaranya adalah upaya penghapusan kemiskinan dan pengangguran. Walaupun upaya ini tetap menjadi tanggung jawab utama dari pemerintah-pemerintah nasional di dalam masyarakat mereka sendiri dan terhadap rakyat mereka sendiri.[19]

---

[15]J.B.W Kuitenbrouwer, *Tata Baru Kapitalisme Sedunia*, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan, 1983, h. 27

[16]Pudjo Suharso, "ASEAN dalam Tata Internasional Baru", *Pelita*, 7 Agustus 1993, h. 4

[17]Deliar Noer, *Op.cit*

[18]J.B.W Kuitenbrouwer, *Op.cit*. h. 5 dan 24

[19]Sumitro Djojohadikusumo, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatip*, Jakarta, 1981, h. 253. Bandingkan: Y.B. Mangunwijaya, "Yang Mana Utara, Yang Mana Selatan?", *Kompas*, 3 September 1992, h. 4. Widjojo Nitisastro, "Kemajuan Selatan, Bukti GNB Bukan Dinosaurus Politik", *Kompas*, 29 Agustus 1992, h. 1

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tapi komitmen ini, bagi negara berkembang, memerlukan suatu kerangka internasional yang baik, bagi dan yang menunjang kebijaksanaan nasional.[20]

Komitmen tersebut semakin urgen mengingat bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang rumit. Di antaranya berupa ledakan penduduk yang membutuhkan bahan pangan. Angka pengangguran, hambatan-hambatan bagi pengembangan proyek industri, pencemaran lingkungan hidup, masalah pendidikan serta penelitian di bidang iptek, perdagangan internasional maupun keuntungan dan kerugian yang dihadapi oleh berbagai perusahaan transnasional, dan sebagainya.[21]

Berbagai krisis di atas terutama yang berkaitan erat dengan permasalahan ekonomi dunia secara rasional tentunya membutuhkan pula adanya tata hukum internasional yang baru pula. Kebutuhan tersebut disebabkan adanya tujuan:

> untuk menimbulkan perubahan hukum dan ekonomis di bidang hubungan internasional, dan sasarannya yang terakhir ialah memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya kepada semua negara agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan internasional berdasarkan prinsip persamaan yang riil, maka permasalahannya tidak lain ialah pembentukan hukum internasional.[22]

Permasalahan tata dunia baru lainnya ialah yang menyangkut dengan dunia informasi. Para ahli sering menyatakan bahwa pasca agraris dan industri, maka pada era selanjutnya masyarakat dunia akan menuju era komunikasi dan informasi. Sampai-sampai standar kekuatan seseorang atau satu negara kelak akan dinilai dari sejauh mana informasi yang dikuasai (dimiliki). Inilah salah satu yang akan turut meramaikan tata dunia baru nantinya:

Fenomena utama yang menjadi ciri abad XX ini adalah "massifikasi", yakni berkembang dan berperannya media massa dalam proses komunikasi antar bangsa. Demikian hebatnya peran media massa ini, sehingga Marshall McLuhan menganalogi situasi informasi dunia dengan istilah *global village*. Apa yang ingin dikemukakan McLuhan di sini adalah kenyataan bahwa dari segi informasi, kehidupan dunia saat ini tidak berbeda dengan kehidupan daerah pedesaan, di mana peristiwa-peristiwa lokal yang terjadi tidak pernah luput dari perhatian masyarakat.[23]

---

[20]Sumitro Djojohadikusumo, *Op.cit.*, h. 254

[21]*Ibid.*, h. 255. Bandingkan dengan Sumitro Djojohadikusumo, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatip*, Jakarta, 1981, h. 259-274. Tanpa pengarang, *Indonesia* dan *Organisasi- organisasi Internasional*, Deplu RI, 1991, h. 87-91

[22]Mohammed Bedjaoui, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, Jakarta, PT Gunung Agung, 1985, h. 277

[23]Eduard Depari, "Tatanan Baru Informasi Internasional", *Kompas*, 27 Agustus 1992, h. 4. Bandingkan: Rusydi Hamka, *Islam dan Era Informasi*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1989, h. 128-140

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan adanya media massa memungkinkan terwujudnya proses pemberitaan secara mondial yang mengatasi jarak, ruang dan waktu. Hingga setiap orang yang mengikuti liputan media menjadi *well-informed.* Namun, pemberitaan tersebut baru bersifat 'penyampaian' informasi, belum pada tahap saling mewujudkan adanya 'pertukaran' informasi antara mitra sejajar. Dengan demikian, negara yang adikuasa akan lebih mudah memperluas dan mendominasi informasi negara yang lebih kecil pengaruhnya. Ketimpangan informasi antara negara maju dan sedang berkembang turut mengiringi kesenjangan lainnya, seperti di bidang ekonomi, politik. dan sebagainya.

Ketimpangan arus informasi dalam proses komunikasi internasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif di identifikasikan sebagai berikut:

1. Arus komunikasi bersifat searah dalam bentuk penyebaran informasi yang berasal dari negara maju dan disebarluaskan di negara-negara sedang berkembang, yang didasarkan "nilai berita" (*news value*) antara keduanya.
2. Arus komunikasi searah dalam bentuk penyebaran informasi dari negara maju dan disebarluaskan di negara sedang berkembang, atas dasar supremasi teknologi komunikasi di satu pihak.
3. Arus komunikasi searah dalam bentuk penyebaran informasi antara negara besar dengan negara kecil, sekali pun memiliki ideologi yang sama.
4. Ketimpangan berita di tengah-tengah negara berkembang sendiri, di mana berita-berita "politik" tampil dominan mengatasi berita-berita nonpolitik.
5. Isu "imperialisme budaya" yang berkaitan dengan proses komunikasi internasional yang mencerminkan apa yang disebut sebagai teori budaya dan madia imperialis (*cultural and media imperialism*).[24]

Untuk merespon ketimpangan tersebut, pada tahun 1980 oleh UNESCO (dalam pertemuan Beograd-Yugoslavia) mengeluarkan suatu resolusi yang menyangkut tatanan baru informasi-internasional (*New World Information Order*) yang menuntut 3 prinsip pokok bagi keseimbangan arus informasi internasional, yakni:

1. Mengimbau negara-negara industri maju agar dalam kebijaksanaan pemberitaannya, menghormati aspirasi dan kedaulatan negara-negara sedang berkembang.
2. Mengimbau negara-negara maju agar dalam kebijaksanaan informasi mereka, tidak sekedar menekankan prinsip *free flow of information,* melainkan menerapkan prinsip *free and balanced information.*
3. Memberikan hak pada setiap negara untuk mengendalikan berita asing yang masuk ke dalam wilayahnya, serta memberikan pula hak untuk menuntut izin kerja bagi setiap wartawan asing. Selain itu tatanan baru informasi internasional, berusaha agar dapat diciptakan suatu kode etik wartawan internasional.[25]

---

[24] *Ibid*

[25] *Ibid*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengenai Tata Informasi Internasional Baru (TIIB) telah pernah diadakan suatu studi komparatif yang dilakukan oleh Wilbur Schramm (1959), yang secara fundamental mencakup kajian tentang :

1. Pola arus dan isi berita yang dapat digeneralisasikan dan bersifat khas.
2. Distorsi arus dan isi berita yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaktahuan internasional.
3. Berita lebih dari sekedar kebudayaan dan hiburan.
4. Rangkaian peristiwa dan juga periode waktu tertentu dipilih.
5. Isu-isu yang konseptual dan metodologis.
6. Surat kabar elit dan berprestise; begitu biasa didefinisikan.
7. Kebutuhan yang membantu pandangan "global".
8. Keyakinan bahwa riset dapat membantu mendefinisikan dan memecahkan berbagai masalah.[26]

III

Sebenarnya, studi TIIB ini mencakup dua periode waktu. *Pertama*, periode 1950-an hingga awal 1970-an. *Kedua*, periode 1970-an hingga 1980-an. Perspektif waktu akan memungkinkan bagi upaya pengamatan terhadap berbagai perubahan titik pandang, konseptualisasi, dan metodologi selama beberapa dekade.

Banyak hasil studi yang telah dicapai, kutipan berikut ini merupakan salah satu contoh hasil kajian Schramm di atas :

> Mengenai bangsa-bangsa "pemberi" dan "penerima" - perbandingan beberapa banyak berita yang keluar dan yang masuk - perbedaan dan persamaan muncul lagi. Karena "krisis", jumlah berita yang keluar dari Timur Tengah dua kali lebih banyak dari jumlah berita yang masuk sehingga membuat wilayah itu menjadi wilayah "pemberi", tetapi ini karena krisis. Sebaliknya, Amerika Latin menerima berita sebanyak sepuluh kali lebih banyak dari berita-berita yang dikirim keluar. Amerika Utara dan Asia menerima berita agak lebih banyak dibandingkan berita yang dikirim keluar. Blok Sino-Soviet mengeluarkan berita sedikit lebih banyak daripada yang diterimanya dan Eropa Barat mengirimkan berita lebih banyak daripada yang diterimanya (tetapi bukan rasio yang substansial). Pada saat ini, kecuali di Amerika Latin, terdapat tingkat "keseimbangan" arus yang substansial.[27]

Sejalan dengan perjalanan waktu, sudah barang tentu ilustrasi di atas telah mengalami pergeseran, tetapi yang penting hal tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena informasi dan komunikasi antar bangsa.

Khusus yang berkaitan dengan Dunia Islam, menurut Dr. H. Roeslan Abdulgani, pengaruh *Lobby* Zionis sangat besar dalam membentuk *public opinion* masyarakat Amerika, khususnya yang berkaitan dengan persoalan

---

[26] Eddy Djamaluddin Malik, *Komunikasi Internasional*, Bandung, 1993, h. 304

[27] *Ibid*, h. 306

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Timur Tengah. Mereka itu menguasai jaringan bisnis perbankan, media cetak, televisi, radio, film, serta perguruan tinggi dan menengah.[28] Orang Yahudi (tahun 1982) yang bekerja di dunia pers kurang dari 6% dari keseluruhan wartawan di AS. Tapi, 25% sampai 30% dari mereka itu bekerja di "media elite", seperti: *The New York Times, the Washington Post, the Wall Street Journal, Time, Newsweek dan US News and World Report.* Mereka juga menguasai jaringan televisi seperti; *CBS, NBC, ABC* dan *Public Broadcasting System* dan stasiun-stasiun terkemuka lainnya.[29]

Satu contoh pers yang berbau zionis dapat kita lihat pada majalah *Time* (No. 12 June, 15, 1992) yang membuat *cover-story* berjudul: *ISLAM, should the World be afraid*? Didalamnya ditemukan potongan-potongan kepala berita dengan judul *The SWORD of ISLAM, The Consequences of Power, Repressi on without Fervor. The Economist* yang terbit di London pernah menulis judul-judul simpatik (April 4-10, 1992); *Living with Islam, Islam Resumes its March, Banking behind the Veil.* Namun, dalam pembukaan editorialnya, mingguan ini menulis; "*Fundamentalism, of the Islamic sort, summons up images of zealous preachers, savage punishment, long leggety fanatics and thin that go bump in the night*".[30]

Contoh propaganda zionistik dalam media massa lainnya dapat pula kita ketahui, dimana pada pertengahan tahun 1992, RCTI dan TVRI mendapat gugatan dari penggemarnya. Gugatan tersebut disebabkan kedua jaringan televisi tersebut menayangkan film-film yang berbau zionis. RCTI (juga direlay SCTV) memutar film berjudul *The Promised Land* (24 april 1992) dan *Sophie's Choice* (5 Mei 1992). TVRI yang siarannya mendapat dukungan dana iuran dari mayoritas Muslim menayangkan film *The False Prince* (29 Januari 1992) dan *Scandal in a Small Town* (22 Juni 1992), yang juga berbau zionis. Bahkan, TVRI juga memutar film serial *Olympic Gold* yang berbau anti Palestina, di saat TVRI menyambut acara Piala Olimpiade Barcelona.[31]

Pers yang bernada zionistik yang cenderung mengeksploitir *sex and crime* juga sering terlihat, khususnya di Indonesia. Dalam menganalisis dan melaporkan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan umat Islam, pers lebih suka menampilkan sisi *conflict* daripada *cooperation*. Bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan munculnya jurnalisme gado-gado, yaitu apa saja

[28]Ainur R. Sophiaan, "Pers Zionis dan Pers Zionistik", *al-Muslimun*, No. 280, h. 60. Bandingkan: Paul Findley, *Mereka Berani Bicara*, Bandung, Mizan, 1990, h. 11. Roger Garaudy, *Israel dan Praktek-Praktek Zionisme*, Bandung, Pustaka, 1988, h. 2. Rusydi Hamka, *Islam dan Era Informasi*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1989

[29]Ainur R. Sophiaan, *Op.cit*, h. 62. *Time*, No. 12, June 15, 1992

[30]*Ibid*

[31]*Ibid*. Bandingkan: majalah *Fakta*, No. 222 edisi 15 Oktober 1992, h. 80.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dilaporkan dan ditulis sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi selera dan kebutuhan pembaca yang beraneka rupa pikiran dan ragam kelas sosial. Sudah pasti tujuan utamanya adalah mendapatkan segmen pasar seluas-luasnya sehingga mampu mencapai tiras sebanyak-banyaknya.[32]

Ironisnya, dunia Islam masih sangat bergantung pada sumber-sumber kantor berita Barat seperti: UPI, AFP, AP dan Reuter. Menurut catatan Dr. Aslam Abdullah:

> ada 42 negara Muslim yang memiliki kantor berita sendiri, namun mereka itu menghasilkan tak lebih dari 1000 kata dalam 24 jam. Dalam sebuah survey tahun 1986 ditemukan bahwa kebanyakan surat kabar berbahasa Arab, Inggris, Parsi dan Urdu di 12 negara Muslim dalam pemberitaan tentang Muslim baik di negara mayoritas maupun minoritas Islam, 90% diambil dari keempat kantor berita tadi. Di sisi lain *International Islamic News Agency* (IINA) bentukan OKI mengaku mentransmisikan 10.000 sampai 12.000 kata per hari, namun produknya sulit tampil di halaman-halaman Dunia Islam.[33]

Dengan demikian tidak perlu heran bila 'pemutar-balikan' oleh media massa atau pers Barat terhadap dunia Islam selalu menyudutkan keberadaan negara-negara Islam. Dalam menyongsong tata informasi baru mendatang, sudah saatnya kantor berita dunia Islam semacam IINA dapat lebih diintensifkan aktivitas maupun perluasan jaringannya di dunia Islam.[34]

Secara kultural, fenomena tata dunia baru ditandai pula dengan munculnya dua kategori peradaban:

Peradaban yang sedang meledak - yang meluas, yang membawa ide-ide ilmiah, rencana ekonomi, ambisi politik, ekspresi kultural - dan peradaban yang sedang mengalami kebangkrutan, jatuh tersuruk karena krisis ekonomi dan sosial politik yang menghambat gagasan besar. Yang pertama penuh

---

[32]Ainur R. Sophiaan, *Op.cit*, h. 64

[33]*Ibid*. Bandingkan: Aslam Abdullah, "Media Muslim Sekarang dan Masa Depan", jurnal Komunikasi *Audentia*, edisi No. 1, Januari-Maret 1993, h. 83-84

[34]Lihat: Edward W. Said tentang 'pemutar-balikan fakta' dalam karya magnum opusnya *Orientalisme*, Bandung, Mizan, 1985. Majalah dunia Islam, *Inthilaq*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Dunia Islam, Januari 1994, h. 33-39 pernah menulis "Terorisme Sebuah Tuduhan" (antara lain dikatakan bahwa peledakan gedung *World Trade Center* (WTC) di New York - (AS) *dituduhkan* kepada Syekh Abdurrahman yang buta itu, padahal *dalang* sebenarnya adalah MOSSAD, FBI dan CIA. Dalam kategori yang sama, Jenderal Fara Aidid (Somalia) dituduh oleh pers Barat sebagai gembong komunis, padahal ia merupakan tokoh Muslim yang taat dan sufistik. Bandingkan juga dengan: Imam Halilintar, "RI Bisa Pelopori Realisasi Hasil Konperensi Menpen OKI", *Merdeka*, 21 Oktober 1988. Menpen RI, H. Harmoko, "Konperensi Menteri Penerangan Negara Islam, Wahana Mempererat Kerja Sama", *Kompas*, 17 Januari 1992, h. 10. H. Harmoko, "Konperensi Menpen OKI Hasilkan Dua Keputusan", *Republika*, 20 Januari 1992, h. 12. Todirun Dydo, *Islam Fundamentalis dan Kegusaran Masyarakat Barat*, Jakarta, PT Golden Terayon Press, 1992, h. iii-v. Mahatir Mohammad, *Sentimen Pers Barat Semangat Anti Islam*, Yogyakarta, Shalahuddin Press, 1992. Ahmad Naufal, *Perang Isu dalam Islam*, Solo, Pustaka Mantiq, 1990. Tanpa pengarang, "Pusat Informasi Kita Jauh Tertinggal", *Adzan*, Jakarta, No. 33/1992, h. 44-60

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dengan optimisme, dengan wawasan ke masa depan; yang kedua dibebani sejarah, tradisi, 'ketentuan', dan kebencian keagamaan dan etnik.[35]

Akhbar S. Ahmad, seorang 'futurolog' Muslim yang banyak menggeluti tentang Islam dan Posmodernisme mengklasifikasikan kelompok G-7 yang dipelopori Amerika dan Jepang sebagai kelompok pertama di atas, sedangkan bagian dunia lainnya, termasuk kategori kedua.[36] Lebih lanjut, Akhbar menyatakan, negara semacam Amerika Selatan dilanda kediktatoran korup dan inflasi, Afrika dilanda perang saudara dan kelaparan, dan semisalnya. Bangsa-bangsa yang bangkrut tidak punya posisi yang kuat untuk memberikan perlawanan atau memberikan alternatif yang dapat diberikan kepada kemajuan peradaban khusus dalam soal kepemimpinan dunia. Tetapi dunia Islam cukup potensial untuk memberikan solusi kepemimpinan global tersebut.[37]

Pola kebudayaan dan pemikiran Barat yang liberalistik pada gilirannya melahirkan *permissive society*, masyarakat serba boleh yang bermunculan sebagai implikasi dari adanya globalisasi satu arah; dari Barat ke Timur. Film bioskop, tayangan TV, siaran radio, pemberitaan lewat media elektronik dan pers, penerbitan, kesenian, perhotelan, restoran mewah dan sederhana (*Kentucky, Texas, Pizza*), peragaan mode pakaian, serta lenggang-lenggok peragawati mencerminkan *permissive society* di atas.[38]

Pada tingkat perkembangan lebih lanjut, dominasi peradaban Barat akhirnya melahirkan perlawanan budaya dari dunia Timur terutama di kalangan negara-negara Muslim. Inilah yang menjadi tesis Prof. Samuel Huntington (ilmuan politik AS di Harvard University) melalui pernyataannya; '*... that cultural conflict will replace ideological struggle in the upcoming era*'.[39] Walaupun pernyataannya tersebut banyak mengundang kebenaran, dan merupakan sesuatu yang harus diantisipasi oleh Barat sendiri.[40]

---

[35]Akhbar S. Ahmad, *Posmodernisme Bahaya & Harapan Bagi Islam*, Bandung, Mizan, 1993, h. 114

[36]*Ibid*

[37]*Ibid*, h. 115

[38]Deliar Noer, *Op.cit.*, h. 1

[39]Lihat dalam: "The Next Battleground", *Time*, June 28, 1993, p. 41

[40]Lihat bahasan lebih lanjut dalam: *Ulumul Qur'an*, No. 05/Vol. IV/1993. Ahmad Suhelmi, "Konflik Peradaban dan Sindrom Islam Huntington", *Pelita*, 1 September 1993, h. 4. M. Fajrul Falakh, "Harmoni Antar Peradaban: Pertemuan Inklusif", *Kompas*, 15 November 1993, h. 4. Samuel P. Huntington, "Benturan Kebudayaan?", (terj.) *al-Jami'ah*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, No. 53/Th. 1993, h. 1-26. Bandingkan: rangkuman pendapat tentang kebangkitan Islam, *Republika*, 12 Juni 1993. Tanpa pengarang, "Fundamentalisme Islam Jadi Ancaman Pasca Perang Dingin", *Kompas*, 17 Desember 1993, h. 14. Riza Sihbudi "Indonesia, Bosnia dan Kemunafikan Barat", *Suara Merdeka*, 1 Pebruari 1994, h. 4

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Apa yang diungkapkan Huntington di atas dikenal dengan istilah Benturan Peradaban (*Clash Civilization*). Dan berdasarkan itu pula, pakar politik Timur Tengah, Dr. M. Amin Rais mengingatkan umat Islam untuk bersiap diri menghadapi tiga kekuatan di masa mendatang; Kristiani, Cina dan Hindu, yakni dengan meningkatkan kekuatan teknologi di dunia Islam.[41]

Walaupun di satu sisi, para analis politik Barat maupun Timur membenarkan adanya kecenderungan konflik peradaban di atas, namun ada perkembangan baru yang layak pula untuk diantisipasi yakni munculnya fenomena apresiasi antar budaya (Timur dan Barat) untuk saling ber-*ta'arafu* (saling kenal) yang kelak berimplikasi pada munculnya saling pengertian terutama dalam bidang akademis dan kultural. Banyaknya kritik terhadap kajian orientalisme di Barat yang kini cenderung beralih pada studi kawasan (seperti Asianis, Arabis, Iranis, Indonesianis, dan sebagainya), disambut pula munculnya kajian oksidentalisme di kawasan dunia Timur.

Pidato ilmiah Pangeran Charles pada forum Pusat Studi Islam di Oxford Inggris, merupakan suatu angin penyejuk bagi akurnya dua peradaban besar (Barat-Islam) di masa yang datang, terlebih lagi bila fenomena itu dapat kita lihat secara arif, apresiatif dan dengan berbaik sangka (tidak dengan pandangan yang apriori).[42]

Berbagai isu kontroversial lainnya yang mengiringi isu tata dunia baru di antaranya ialah tentang perdebatan 'posmodernisme' atau 'post-strukturalisme' yang pada awalnya beranjak dari *discourse* seni (estetika) tapi akhirnya merambah ke dunia filsafat bahkan agama. Fenomena yang muncul akhir-akhir ini juga ditandai dengan adanya gerakan penolakan dan pembongkaran (dekonstruksi) terhadap paradigma sains yang selama ini diwarnai oleh aliran positivisme dan rasionalisme yang cenderung menafikan hal-hal yang metafisik atau meta-rasional.

Disamping itu terjadi semacam pergeseran dalam disiplin ilmu filsafat, yang selama ini dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat spesifik beralih menjadi teori berpikir kritis bagi semua disiplin ilmu yang ada. Maka muncul istilah-istilah filsafat hukum, filsafat politik, filsafat ekonomi, filsafat sosial, dan sebagainya merupakan indikasi dari adanya pergeseran dimaksud.

---

[41]Lihat harian *Jawa Pos*, 23 Pebruari 1994, h. 10

[42]Sulastomo MPH. "Pandangan Barat Terhadap Kebangkitan Islam", *Pelita*, 23, 25 Oktober 1993, h. 1. Roeslan Abdulgani. "Dunia Islam Dalam Sorotan Barat", *Waspada*, 19 Juni 1992, h. 4. Pidato Pangeran Charles, "Islam dan Barat", *Republika*, 12, 13 November 1993, h. 1. Tanpa pengarang, "Studi Islam di Australia", *Pelita*, 14 Pebruari 1994. Tanpa pengarang, "Studi Islam di Oxford", *Pelita*, 19 Pebruari 1994. Nur A. Fadhil Lubis, "Kecenderungan Kajian Islam di Amerika: Sebuah Survey Kepustakaan", *Ulumul Qur'an*, No. 4/Vol. IV/93, h. 68. Bandingkan dengan pengkajian khusus tema Orientalisme, *Ulumul Qur'an*, No. 2/Vol. III/92. Tarmizi Taher. "Alumni Timur dan Barat Perlu Disatukan", *Jawa Pos*, 20 Juni 1993. Daud Rasyid. "Studi di Barat", *Pelita*, 27 April 1993, h. 4

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di sisi lain, ada semacam kecenderungan yakni bila di masa Yunani filsafat cenderung bersifat kosmologis, pada abad pertengahan bercorak teologis, dan abad renaisans bercorak antropologis; maka dewasa ini filsafat lebih berorientasi pada filsafat bahasa atau Hermeneutika (teori tentang penafsiran). Sedangkan di bidang iptek, kajian tentang molekuler, bioteknologi dan rekayasa genetika turut meramaikan kemunculan isu tata dunia baru.

Dari sudut pandangan keagamaan, pembudayaan dialog antar umat beragama telah selangkah lebih maju menuju upaya bagi terwujudnya sistem etika global yang erat kaitannya tentang tanggung jawab umat beragama dalam mengatasi berbagai problema kemanusiaan. Aspek pluralisme keberagamaan, inklusifisme dan spiritualisme (religiositas) maupun teologi keagamaan yang berorientasi sosial (tidak semata-mata ritual) adalah merupakan bagian perkembangan yang menarik untuk diamati. Hal ini terkait pula dengan munculnya isu tentang demokratisasi, lingkungan hidup, penegakan hak-hak asasi manusia dan juga gerakan kaum perempuan (feminisme).[43]

IV

Setelah dikemukakan tentang isu tata dunia baru dan beberapa komponen yang mengiringinya, maka pada bagian berikut ini penulis coba merentangkan beberapa strategi Barat dalam membangun tata dunia baru dimaksud.

1. AS (Barat) selalu bersikap melindungi berbagai kepentingannya di berbagai belahan dunia khususnya di kawasan Timur Tengah, terutama karena alasan sumber daya alam (minyak bumi). Hal ini membawa konsekwensi logis pada sikap AS yang cenderung memanjakan negara orbitnya seperti Israel (misalnya) atau negara-negara lain yang mendukung kepentingannya.
2. Falsafah politik AS (Barat) yang bercorak pragmatisme sudah barang tentu menempatkan asas keuntungan sebagai paradigma pemikiran yang mendasari semua sistem politiknya. Maka, segala sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pragmatis Barat akan membawa kepada munculnya

[43]Tentang posmodernisme; Akhbar S. Ahmad, *Posmodernisme Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, Bandung, Mizan. Tentang paradigma sains; Jalaluddin Rahmat, Paradigma Baru Sain: Kearifan Perennial", *Republika*, 30 November 1993, h. 6. Tentang filsafat bahasa; E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1993. Khusus iptek; *Ulumul Qur'an*, No. 1/April-Juni 1989, h. 4-21 dan 46-62. Tentang dialog antar agama; M. Habib Chirzin, "Seabad Parlemen Agama dan Etika Global", *Republika*, 2 September 1993, h. 6. Nurcholish Madjid, "Sufisme Islam", *Jawa Pos*, 17 dan 18 Juni 1993, h. 4. Bahasan khusus Lingkungan Hidup; *Islamika*, No. 3, Januari-Maret 1994, h. 3-33. Tentang HAM; *Islamika*, No. 2 Oktober-Desember 1993, h. 90-115. Tentang Feminisme; *Islamika*, No. 1 Juli- September 1993, h. 53-60, 107-109

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sikap permusuhan Barat terhadap setiap negara yang mencoba mengusik hal itu. Kasus FIS di Aljazair, Somalia, Irak, Iran, Libya, dan sebagainya merupakan indikasi dari gambaran sikap pragmatisme Barat tersebut.

3. Secara politis, sikap pragmatis tersebut melahirkan sistem politik AS (Barat) yang berwajah ganda (*double political standard*) terutama dalam sistem politik luar negerinya. Istilah kawan dan lawan bagi Barat sangat tergantung kepada kepentingan pragmatis Barat itu sendiri.
4. Barat senantiasa menciptakan rival mereka sebagai partner yang secara kondusif dapat menjadi legitimasi pengokohan bagi negara Barat sebagai adi-daya dunia. Keinginan AS menjadi polisi dunia merupakan salah satu dari upaya di atas. Hal ini membawa implikasi kepada terciptanya perang atau kontak senjata bikinan Barat agar tetap berjalannya bisnis persenjataan berat dari Barat ke negara-negara lemah. Juga akan semakin memperkokoh eksistensi Barat sebagai juru damai setiap persengketaan dunia, hingga ketergantungan negara-negara non adi-daya terhadap Barat tetap terpelihara. Juga untuk menciptakan ketegangan psikologis bagi negara lain agar AS (Barat) tetap ditakuti dan disegani sebagai super power dunia. Ini berarti tujuan utama Barat untuk menguasai segenap potensi kekayaan dunia akan tetap terjamin demi hari depan mereka sendiri.
5. Barat senantiasa berupaya menguasai sistem perekonomian dunia juga lewat intervensi kultural. Maka politik asosiasi kultural ini secara jangka panjang akan membawa hasil akan terbaratkannya negara-negara non-Barat dan berakibat pada upaya pelestarian sumber-sumber ekonomi itu sendiri.
6. Upaya menciptakan ketergantungan terhadap Barat juga dilakukan lewat manuver-manuver politik berupa pelemparan isu-isu kontroversial seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup, lebih-lebih terhadap negara berkembang. Yang tujuannya tidak lain untuk tercapainya keuntungan ekonomis. Isu-isu senada juga dilontarkan oleh Barat seperti isu proyek nuklir, terorisme, fundamentalisme, dan yang senada merupakan upaya Barat untuk mengurangi sumber kekuatan dan independensi negara-negara berkembang, agar tetap dalam kontrol Barat.
7. Negara-negara Barat juga sengaja memberikan proyek bantuan luar negeri, demi tercapainya proses ketergantungan negara-negara berkembang yang permanen.
8. Barat selalu menampakkan superioritasnya sejalan dengan penampakan inferioritas Timur di mata Barat, lewat berbagai jaringan media massa dan komunikasi internasional.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

9. Barat juga tidak segan-segan menggunakan sistem politik 'belah bambu' (adu domba) terutama terhadap sesama negara Islam, untuk menjaga agar tidak satu pun negara Islam dapat muncul sebagai adi daya baru, yang bisa merugikan kepentingan dunia Barat.
10. Dunia Barat senantiasa merahasiakan inti perkembangan iptek mereka, agar tetap unggul di banding negara lain.
11. Barat berupaya merekrut para elite negara berkembang untuk di - *brain washing*, yang secara kultural akan dapat memberikan keuntungan politis dan sebagai penjamin bagi amannya kepentingan Barat di luar negeri mereka.
12. Barat senantiasa memojokkan tokoh atau pemimpin negara Islam atau berkembang sebagai upaya untuk melumpuhkan kharisma kepemimpinan tokoh tersebut di negaranya sendiri. Serta untuk menimbulkan citra negatif bagi pemimpin tersebut di mata para pengikutnya (rakyatnya).
13. Barat selalu memancing kemarahan dunia Islam lewat berbagai kasus yang dianggap dapat menyinggung perasaan umat Islam. Tujuannya tak lain agar sikap rasionalitas umat selalu tenggelam dengan berbagai peristiwa yang lebih mengundang emosionalitas umat. Dengan demikian umat Islam senantiasa berjalan di tempat, tidak sempat berpikir strategis jangka panjang yang tentunya menuntut penggalian rasionalitas Islam tingkat tinggi.
14. Barat juga melontarkan isu benturan peradaban (*Clash Civilization*) setelah runtuhnya komunisme, sebagai upaya antisipatif atas munculnya kecenderungan kebangkitan Islam sedunia yang kelak dapat mengurangi pamor Barat di mata internasional.

V

Bila kita lihat kembali beberapa tanggapan terhadap munculnya isu Tata Dunia Baru di atas serta beberapa strategi Barat untuk mencapainya, tampak jelas bahwa; *pertama* isu tersebut lebih bersifat *western oriented*, atau dengan kata lain, isu tersebut tak lebih sebagai proyek ambisius Barat (AS) untuk menciptakan tatanan dunia global yang tidak akan lepas dari kerangka acuan yang telah mereka angankan. *Kedua*, isu itu sendiri belumlah mencapai suatu tahapan yang formulatif-prediktif, lebih-lebih lagi bila dikaitkan dengan kepentingan global, tidak semata-mata untuk kepentingan dunia Barat. *Ketiga*, berdasarkan dua hal di atas, isu Tata Dunia Baru tersebut tentunya masih sangat terbuka untuk diperdebatkan di berbagai forum internasional semacam PBB, GNB maupun OKI serta berbagai forum lainnya. Hal ini tentunya

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

membuka peluang bagi setiap badan internasional untuk *urun rembug* dan saling tukar informasi dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih adil dan penuh nuansa kedamaian.

Tak dapat dipungkiri bahwa, keinginan untuk menciptakan Tata Dunia Baru tersebut tidak lepas dari cermin egoisme ideologi Kapitalisme Internasional, di mana AS sebagai penarik gerbongnya, yang sudah tentu bersifat pragmatik. Anehnya, keinginan tersebut tidak pula dibarengi dengan kesiapan struktur sosial maupun kultur masyarakat Barat sendiri yang kini tengah bergelut dengan berbagai sumber kerapuhan seperti bahaya krisis keluarga, alkoholisme, kriminalitas maupun kekacauan budaya yang saat ini tengah dialami oleh sebagian besar negara-negara Barat. Secara logika, bagaimana mungkin suatu keinginan besar untuk membangun Tata Dunia Baru, yang sebenarnya tidak didukung oleh kesiapan berbagai elemen yang bersifat struktural maupun kultural dapat terealisasikan? Jangankan mengurus persoalan dunia yang begitu kompleks, untuk menyelesaikan problem nasional di negara-negara Barat sendiri masih membutuhkan waktu yang relatif panjang. Lebih tidak mungkin lagi, bila dikaitkan dengan semakin memudarnya doktrin Kapitalisme Internasional baik di Barat maupun negara-negara Timur yang telah terbaratkan, baik secara ideologis-politis, ekonomis maupun sosio-kultural.

Pertanyaan lebih lanjut dapat dikemukakan, apakah keinginan untuk menciptakan Tata Dunia Baru tersebut juga bisa dilatar-belakangi oleh trauma masa lalu Barat terhadap kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dicapai oleh *Ottoman Empire*. Kasus di Bosnia dan negara-negara Asia Tengah lainnya lebih mencerminkan hal tersebut.

Bukankah isu perbenturan Timur-Barat kini terasa semakin tidak relevan. Karena antara keduanya kini dituntut untuk saling mengisi dan menjalin kerjasama internasional yang prospektif dan konstruktif, demi masa depan kemanusiaan sendiri secara global dan mondial. Apalagi bila dikaitkan dengan Islam sebagai suatu agama dan sistem ajaran yang sejak lahirnya tidak mengenal dikotomi untuk Barat maupun Timur. Bahkan secara historis, eksisnya peradaban Islam justeru karena Islam telah berbaik hati untuk mengadopsi berbagai unsur peradaban dunia lalu dikemas dan dibingkai dengan nilai-nilai Islami. Sayangnya, fakta historis di atas cenderung lepas atau sengaja dilupakan dari kacamata pengamatan para analis Barat juga sebagian dari penulis Muslim sendiri, walaupun ada juga yang mau mema- hami dan menerimanya sebagai suatu kenyataan sejarah.

Lebih disayangkan lagi, *main-stream* yang berkembang di Barat kini justeru adanya jaringan kolusif yang ingin mengenyahkan Islam dari muka bumi ini, karena dianggap sebagai momok yang akan menghantui mereka di

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

masa yang akan datang. Bukankah Islam dan Barat yang Kristiani sama-sama (secara doktrinal) mengajarkan watak cinta-kasih terhadap sesama umat manusia. Bukankah antara Islam, Yahudi dan Nasrani sama-sama bernenek-moyangkan Ibrahim as, sebagai simbol persatuan umat manusia sedunia. Bukankah Barat seharusnya berterima kasih kepada Islam karena telah mewariskan kemajuan iptek dunia Islam di masa pra-renaisans, hingga Barat menjadi besar dan gemerlap dewasa ini. Bahkan Islam secara lebih awal, pernah menjadi supremasi dunia selama 8 abad sebelum kebangkitan Eropa, dimana Barat sendiri baru sekitar 2 abad mampu mewariskan kemajuan peradaban itu sampai hari ini.

Fakta historis lainnya, juga cenderung dilupakan oleh dunia Barat, dimana saja (umumnya) umat Islam bersifat mayoritas, maka golongan minoritas (non-Muslim) selalu dalam keadaan aman dan terlindungi. Sepadankah ini dengan fenomena sebaliknya seperti yang dihadapi umat Islam di Bosnia, Somalia, Palestina, Filipina, Muslim Rohingnya, Muslim Liberia, dan negara-negara lainnya.

Dapatkah dunia Barat mengingkari beberapa pengakuan analis barat sendiri tentang 'kebaikan' Islam seperti yang pernah diungkapkan oleh tokoh ilmuan Barat semacam Robert N. Bellah, Ernest Gellner, Toynbee, W.M. Watt, Bernard Lewis, H.A.R. Gibb, Wilfred Cantwell Smith, Hefner, dan banyak lagi ilmuan lainnya yang lebih apresiatif dalam melihat Islam.

Walaupun dunia Islam dewasa ini reaktif terhadap apa yang ada di Barat, itu tidak lain, pada umumnya, sebagai perlawanan atau akibat dari sikap Barat sendiri yang dengan segala cara cenderung ingin mengangkangi, mengeksploitasi dan memanipulasi berbagai potensi yang ada di dunia Islam. Kasus Libya, Iran, Irak dan sebagainya tidak lain merupakan kekeliruan dari skenario Barat sendiri dalam rangka ingin menundukkan mereka. Begitu juga kasus yang menimpa Aljazair, fundamentalis Mesir, maupun belahan bumi lainnya.

Untuk mengakhiri ketegangan Islam-Barat ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian negara-negara Barat:

1. Kecenderungan masa depan adalah kemitraan global, bukan lagi bersifat rasa persaingan atau pertentangan.
2. Sikap ambisius Barat justeru akan menjadi bumerang dan merugikan kepentingan jangka panjang dunia Barat. Mengingat, sumber energi industrialisasi Barat seperti minyak justeru sangat tergantung pada potensi yang ada di negara-negara Muslim, khususnya Timur Tengah.
3. Di sebagian besar negara-negara Barat, Islam semakin menampakkan dirinya (seperti yang diramalkan Nabi bahwa matahari (Islam) kelak akan

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

terbit dari Barat). Maka bila Islam terus dimusuhi, kaum muslimin yang ada di Barat atas menjadi bom waktu bagi Barat sendiri.

4. Secara positif, kehadiran Islam di Barat justeru akan banyak membantu mengatasi berbagai kebobrokan struktural maupun kultural sebagaimana yang kini tengah melanda sebagian besar negara Barat.
5. Barat harus dapat mengantisipasi kebangkitan Islam di seluruh dunia dewasa ini (termasuk di Barat sendiri) secara positif, apresiatif dan akomodatif, yang itu merupakan sunnatullah yang tak mungkin dapat dihindari.
6. Peradaban dunia kini membutuhkan adanya suntikan spiritualitas baru. Di sini Barat dapat bekerjasama dengan Islam untuk memberikan kontribusinya yang terbaik.
7. Opini masyarakat dunia kini semakin jenuh dengan segala sikap arogansi maupun imperialisme yang ditegakkan di atas ketidakbenaran maupun kezaliman. Secara ideologis-politis fenomena di atas akan berpihak pada Islam dan berhadapan langsung dengan Barat (bila tidak segera merubah citra arogannya seperti yang tampak dewasa ini).
8. Kini banyak ilmuan Barat sendiri semakin dekat dengan Islam, dalam pengertian lebih jernih melihat kebenaran. Suatu masa mereka akan memperingatkan saudaranya sendiri (di Barat) yang keliru dalam melihat dunia Islam.
9. Tata Dunia Baru justeru mendambakan adanya sistem nilai dan rekayasa peradaban yang lebih apresiatif, komunikatif dan integratif, yang secara potensial kini terpendam di bumi dan kandungan khazanah budaya Islam, yang sangat prospektif bila dikembangkan untuk sumbangan bagi masa depan peradaban dunia.
10. Isu-isu yang dilontarkan Barat, seperti demokratisasi, lingkungan hidup, feminisme, penegakan hak-hak asasi manusia, pengembangan etika global maupun rekayasa iptek akan lebih aman dan nyaman bila digali dari kandungan ajaran Islam, ketimbang sistem kebudayan Barat yang kini tengah berada di tepi jurang kehancuran. Dan itu suatu realita yang tak terbantahkan, bila mata hati maupun mata rasa Barat mau melihatnya secara jernih (akademis, tidak semata-mata politis) serta apresiatif terhadap kekayaan khazanah kebudayaan Islam. Wallahu a'lam bisshawab.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta